



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026.

Rencana Kerja ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan Program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 bagi para pengelola di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini dibuat untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Tentunya hal tersebut dibutuhkan perencanaan kerja yang baik agar sasaran dan tujuan dapat berjalan dengan baik serta mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Mojokerto, Januari 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO**



AMAT/SUSILO, S.Sos, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19721206 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU..... 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 22

2.3. Isu – Isu Penting..... 25

2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD 25

2.3.2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM
dan SDGs (Sustainable Development Goals) 25

2.3.3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan..... 27

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 28

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 37

BAB III TUJUAN, SASARAN 38

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 38

3.2. Sasaran 38

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH /OPD
..... 45**

BAB V PENUTUP 51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra Perangkat Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas pada forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat

Daerah. Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikordiniroleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2027.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Mojokerto juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal pembentukan Kabupaten Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
23. Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang rencana HAM tahun 2021 - 2025;
24. Peraturan Presiden nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1990/1991 – 2013/2014 Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Seri C Tahun 2001) ;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15) ;
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto

- Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3;
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 7);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
 41. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto;
 42. Peraturan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 43. Peraturan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 44. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Tahun 2021 – 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026, yang memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah.
2. Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi para penyelenggara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

B. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun sebelumnya (2025) serta merumuskan arah kebijakan program dan kegiatan tahun 2026.
2. Mengarahkan pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke dalam suatu strategi program/kegiatan.
3. Menyusun kebijakan serta menegaskan tujuan, sasaran program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2026 yang merupakan implementasi dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029.
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perang dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah,serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

I.4. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.

Sajian Tabel TC-32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai :

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC-33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

Bab V P E N U T U P

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, secara umum selaras dengan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sedangkan capaian kinerja sasaran pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 secara umum dapat disajikan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pendaftaran Penduduk
- c. Program Pencatatan Sipil
- d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Capaian

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 pada umumnya tercapai, Adapun capaian program dan kegiatan tahun 2024 sampai dengan triwulan keempat diuraikan sebagai berikut :

1.) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah terpenuhinya kebutuhan penunjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan.

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu (Dokumen).

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen), terealisasi sebesar 100,00%;

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan), terealisasi sebesar 100,00%.

- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan yang dilaporkan (Laporan).

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan), terealisasi sebesar 92,73%;

c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan), terealisasi sebesar 98,43%;

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan), terealisasi sebesar 100,00%;

d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Persentase sarana dan prasarana yang tersedia ;

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit), terealisasi sebesar 99,61%;

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah pelaksanaan rehabilitasi sedang / berat dan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor, terealisasi sebesar 99,83%;

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit), terealisasi sebesar 100,00%.

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Pencapaian kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, terealisasi sebesar 96,98%;

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, terealisasi sebesar 99,99%;

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, terealisasi sebesar 100%;

4. Penyediaan Bahan / Material.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, terealisasi sebesar 98,00%;

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, terealisasi sebesar 98,39%;

2.) Program Pendaftaran Penduduk

Pencapaian kinerja Program Pendaftaran Penduduk adalah Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk.

a) Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pencapaian kinerja kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah jumlah kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk.

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk(Dokumen), terealisasi sebesar 99,69%;

2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan), terealisasi sebesar 100%.

b) Penataan Pendaftaran Penduduk

Pencapaian kinerja kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah jumlah penerbitan dokumen KIA.

1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia(Dokumen), terealisasi sebesar 76,18%.

3.) Program Pencatatan Sipil

Pencapaian kinerja program Pencatatan Sipil adalah persentase kepemilikan dokumen Pencatatan sipil.

a) Pelayanan Pencatatan Sipil

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil.

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting(Dokumen), terealisasi sebesar 80,32%;

4.) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pencapaian kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah Persentase pemeliharaan perangkat SIAK Online.

a) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu.

1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen), terealisasi sebesar 100%;

b) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan sosialisasi.

1. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen), terealisasi sebesar 100%.

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto telah melakukan perubahandan terobosan dalam sistem pelayanan melalui inovasi pelayanan antara lain :

1. Pasukan Balaputra Kita (Pelayanan khusus Bayi Lahir Pulang Terima Akta Kelahiran dan KIA);
2. Si Jempol (Siap Jemput Bola) ke desa-desa atau sekolah-sekolah;
3. Pelaku Para Dewi (Pelayanan Khusus Perangkat Desa Lewat Website).

Tabel T-C.2.9
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD
DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target kinerja capaian program Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	84,27	82,16%	10.109.628.031	9.535.980.183	94,33%	100%	8.484.518.725	100,00%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	15.000.000	100,00%	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKPD yang tersusun	4 Dokumen	91,30%	7.500.000	7.500.000	100,00%	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang tersusun	8 Laporan	97,00%	7.500.000	7.500.000	100,00%	8 Laporan	25.000.000	8 Laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang terlaporkan	13 Laporan	81,62%	7.320.306.725	6.879.146.944	93,97%	13 Laporan	5.169.998.725	13 Laporan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	81,59%	5.318.406.725	4.931.997.269	92,73%	14 Bulan	5.144.998.725	14 Bulan

Kode						Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target kinerja capaian program Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
										Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	91,67%	2.001.900.000	1.947.149.675	97,27%	100%	3.655.823.899	1 Laporan
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	1 Paket	48,91%	1.659.900.000	1.609.819.100	96,98%	1 Paket	483.655.767	100,00%
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan	48,91%	20.000.000	19.998.000	99,99%	12 Bulan	443.695.767	304 Desa
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	87,87%	50.000.000	50.000.000	100,00%	1 Paket	1.794.819.865	100,00%
						Penyediaan Bahan / Material	Jumlah alat tulis kantor sesuai kebutuhan	1 Paket	96,32%	75.000.000	73.500.000	98,00%	1 Paket	913.652.500	1 Paket
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	100,00%	197.000.000	193.832.575	98,39%	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	50,21%	37.800.000	18.980.500	50,21%	100%	50.000.000	1 Paket
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening / tagihan telepon listrik dan air yang terbayar	12 Bulan	98,70%	140.655.000	138.448.557	98,43%	12 Bulan	100.000.000	1 Paket
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan	3 Orang	100,00%	108.669.244	108.666.830	100,00%	3 Orang	-	0,00%

Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target kinerja capaian program Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
									Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia	100%	33,45%	181.368.000	60.664.559	33,45%	100%	195.368.000	12 Bulan
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pelaksanaan perbaikan kendaraan dinas dan pajak-pajak kendaraan dinas bermotor yang terbayar	12 Bulan	93,10%	50.000.000	49.807.000	99,61%	12 Bulan	515.799.365	1 Aplikasi
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan rehabilitasi sedang / berat dan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	12 Bulan	91,09%	225.000.000	224.616.900	99,83%	12 Bulan	651.044.368	100,00%
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan perbaikan peralatan gedung kantor	12 Bulan	89,81%	30.000.000	30.000.000	100,00%	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100%	91,39%	508.044.368	464.315.784	91,39%	3 orang	531.044.368	3 orang
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	60 Stel	90,35%	43.200.000	43.128.000	99,83%	60 Stel	335.000.000	100,00%

Kode						Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target kinerja capaian program Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
										Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100,00%	92,97%	877.117.000	863.240.086	98,42%	100%	835.800.000	KTP = 98% KK = 98% KIA = 31% SKPWNI = 98%
						Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	882352 Dokumen	92,96%	827.117.000	818.390.086	98,94%	882352 Dokumen	760.800.000	885000 Dokumen
						Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk; Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	63987 Dokumen	100,00%	517.772.000	516.258.500	99,71%	63987 Dokumen	230.000.000	70000 Dokumen
						Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	225000 Pelayanan	77,78%	309.345.000	302.131.586	97,67%	225000 Pelayanan	250.000.000	225000 Pelayanan
						Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen KIA	20.000 blanko	93,00%	50.000.000	44.850.000	89,70%	95500 Dokumen	75.000.000	95500 Dokumen
						Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Blangko KIA	35000 Keping	93,00%	50.000.000	44.850.000	89,70%	35000 Keping	75.000.000	35000 Dokumen

Kode						Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target kinerja capaian program Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
										Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	93,00%	92,32%	383.000.000	377.039.573	98,44%	Akta Lahir (0-18) = 93% Akta Kematian= 98% Akta Perkawinan = 98% Akta Perceraian = 98%	389.600.000	Akta Lahir (0-18) = 93% Akta Kematian= 98% Akta Perkawinan = 98% Akta Perceraian = 98%
						Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan dokumen pencatatan sipil	310000 dokumen	92,32%	383.000.000	377.039.573	98,44%	310000 Dokumen	389.600.000	310000 Dokumen
						Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil, Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	19200 dokumen, 6 orang	92,32%	383.000.000	377.039.573	98,44%	19200 Dokumen 6 Orang	389.600.000	19200 Dokumen 6 Orang
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemeliharaan Perangkat SIAK online	100,00%	95,73%	250.000.000	221.131.220	88,45%	100%	490.000.000	100,00%
						Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu	12 kegiatan	100,00%	175.000.000	173.951.720	99,40%	12 Kegiatan	250.000.000	12 Kegiatan
						Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Pemeliharaan dan Pengoperasian Jaringan SIAK secara Terpadu	12 kali	100,00%	175.000.000	173.951.720	99,40%	12 kali	250.000.000	12 kali
						Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	1 kali	87,19%	75.000.000	47.179.500	62,91%	1 kali	120.000.000	1 kali

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar dari 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk tahun 2025-2029 seluruhnya telah dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

No	Sasaran	Pencapaian	
		Tercapai	Tidak Tercapai
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel dan Responsif	√	

1. SASARAN 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan/ kegagalan dan pencapaian sasaran adalah:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM Pelayanan	88,35	90,26	102,16 %	85

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	81,3 (A)	99,15 %	84,27 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,30%	94,25%	102,11 %	-
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	85 (Tinggi)	87,20 (Tinggi)	102,59 %	-
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi	3 Inovasi	3 Inovasi	-

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan (KTP-el)	98,50%	99,60%	101%
Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan (KK)	98,50%	100%	102%
Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan (KIA)	33%	72,76%	220%
Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran usia 0-18)	94%	99,02%	105%
Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan (Akta Kematian)	99%	100%	101%
Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	100%	100%	100%
Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	100%	100%	100%
Hasil Capaian Kinerja			118,43%

***Catatan : Data Penduduk Tahun 2024**

Hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan indikator kinerja angka kepemilikan dokumen kependudukan yang meliputi kepemilikan KTP-el, Kartu Keluarga, Akta kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian menunjukkan capaian kinerja sebesar 118,43%. Dari indikator *output* diatas, hasil (*outcome*) yang diharapkan adalah terwujudnya tertib administrasi kependudukan.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Mojokerto

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	KTP			99%	100%	99,77%	99,78%	100%				Tercapainya Kepemilikan KTP
2	KK			100%	100%	100%	100%	100%				Tercapainya Kepemilikan KK
3	KIA	62%		60%	62%	64,00%	66,00%	72,76%				Tercapainya Kepemilikan Dokumen KIA
4	Akta Kematian	100%		100%	100%	100%	100%	100%				Tercapainya Kepemilikan Dokumen Akta Kematian
5	Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	100%		99%	100%	100%	100%	99,02%				Tercapainya kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			88,35	90,5	90,8	91	90,26				Tercapainya Kepuasan Masyarakat Terhadap kepemilikan Dokumen Admindak

***Catatan : Data Penduduk Tahun 2024**

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam prosedur memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan yang sesuai aturan;
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya data kependudukan;
3. Kebijakan kependudukan yang berubah – ubah;
4. Perubahan sistem pelayanan kependudukan belum bisa dipahami/dimengerti oleh masyarakat luas;
5. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dan kuantitas;
6. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional pelayanan administrasi kependudukan yang mengakibatkan belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan;
7. Masyarakat kurang memahami akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil;
8. Belum tersosialisasikannya kebijakan kependudukan secara menyeluruh.

2.3.2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagai penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Mojokerto akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi nasional yaitu “Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas”.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan menuju pada masyarakat

tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien serta Negara yang memiliki daya saing, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengintruksikan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar melaksanakan pelayanan secara Daring yakni pelayanan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan cara media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi atau melalui Kios Layanan Mandiri Dukcapil.

Program sadar kepemilikan dokumen kependudukan difokuskan pada peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan satuan kerja dan komunitas masyarakat. Pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan yang diperlukan setiap penduduk, peningkatan nilai guna dokumen kependudukan bagi berbagai pelayanan publik, dan pencapaian target kinerja pemerintah daerah di bidang penerbitan dokumen kependudukan sesuai target nasional yang telah ditentukan.

Program sadar pemutakhiran data kependudukan ditandai dengan peningkatan kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap terjadi perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk. Selain itu dengan dilaksanakannya pemutakhiran KK sebagai data induk penduduk secara berkala, dan pelaksanaan konsolidasi data penduduk secara tertib dan teratur melalui aplikasi SIAK.

Sedangkan fokus program sadar pemanfaatan data kependudukan sebagai satu-satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan, antara lain dengan pemanfaatan data kependudukan oleh seluruh perangkat daerah untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Serta pemberian kemudahan bagi lembaga pengguna data non lembaga vertikal dalam kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

Guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat dilakukan dengan peningkatan perilaku aparatur untuk mendukung pelayanan

administrasi kependudukan, menyederhanakan mekanisme dan syarat pelayanan administrasi kependudukan, membuat inovasi pelayanan administrasi kependudukan sehingga pelayanan menjadi efektif dan efisien, serta mengembangkan sistem pelayanan administrasi yang online dan terintegrasi antar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang berkaitan.

Dengan adanya web yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat diharapkan akan dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak perlu lagi datang berbondong-bondong ke disdukcapil hanya untuk mendapatkan dokumen kependudukan dimaksud. Masyarakat bisa mengakses dimanapun dan kapan pun mereka memerlukan dokumen kependudukan, sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

2.3.3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan isu-isu nasional dan regional.

Dari isu-isu penting tersebut diatas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. Gedung dan lahan parkir kurang memadai untuk mendukung pelayanan masyarakat di bidang Adminduk;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan IT untuk mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan secara online;
3. Peningkatan kinerja dan pelaksanaan tugas dari aparat pelaksana;
4. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pemilikan dokumen kependudukan berupa akta-akta pencatatan sipil, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak maupun Kartu Keluarga;
5. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap terjadinya peristiwa penting dan peristiwa kependudukan;

6. Peningkatan pelayanan prima akan terwujud dengan adanya dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan berkualitas serta didukung tenaga pelaksana (tenaga IT) yang memadai;
7. Untuk mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang akurat dan berbasis teknologi; sesuai dengan Misi ke-3 dan sasaran ke-1 pada RPJMD Tahun 2021-2026, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan kegiatan pengelolaan dan penelusuran arsip Akta Pencatatan Sipil dengan Teknologi Informasi (TI) agar arsip dapat tersimpan dengan aman, dan dapat ditelusuri dengan cepat serta akurat;

2.4. Review terhadap RKPD

Perbandingan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagaimana tabel berikut

:

Tabel T-C 3.1
Review Terhadap RKPD Tahun 2026 Kabupaten
Mojokerto
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	7.107.655.200	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.17 (A)	6.921.384.465	
			Jumlah Inovasi	3 Inovasi				Jumlah Inovasi	2 Inovasi		
			Nilai IKM	90,8				Nilai IKM	82		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	12 Dokumen	12.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	12 Dokumen	10.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	6.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan yang dilaporkan	13 Laporan	5.453.708.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan yang dilaporkan	13 Laporan	5.453.708.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan	5.453.708.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang/bulan	5.453.708.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	732.147.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	631.938.365	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	502.324.630	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	455.938.365	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	45.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	38.822.570	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	130.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	776.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	746.754.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	266.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	236.754.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	510.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	510.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana yang tersedia	100%	133.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana yang tersedia	100%	78.984.100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	40.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	28,984,100	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	47.500.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	45.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	30.000.000	
	Program Pendaftaran Penduduk		Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	99,77%	167.645.000	Program Pendaftaran Penduduk		Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	100%	120.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP)	880000 Dokumen	167.000.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP)	880000 Dokumen	120.000.000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (KK,KTP,KIA)	137000 Dokumen	92.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (KK,KTP,KIA)	136000 Dokumen	70.000.000	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	50.000.000	
	Program Pencatatan Sipil		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Lahir & Akta Mati)	99,50%	71.000.000	Program Pencatatan Sipil		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Lahir & Akta Mati)	93%	60.000.000	
	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil(Akta Lahir 0-18 & Akta Mati)	310000 Dokumen	71.000.000	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil(Akta Lahir 0-18 & Akta Mati)	310000 Dokumen	60.000.000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Akta Lahir & Mati)	65000 Dokumen	71.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Akta Lahir & Mati)	65000 Dokumen	60.000.000	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid	100%	131.000.000	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid	100%	95.000.000	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu	12 kegiatan	81.000.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu	12 kegiatan	60.000.000	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	81.000.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	60.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	1 kali	50.000.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	1 kali	35.000.000	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	35 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	6 Dokumen	35.000.000	
Jumlah					7.477.300.200	Jumlah					7.196.384.465

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat 3 pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah, masyarakat dan swasta. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan swasta yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 :

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
NO	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

Pada Musrenbang Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 tidak ada usulan program dan kegiatan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dari masyarakat dan swasta.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program dan kegiatan nasional dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

3.2. Sasaran

Sasaran merupakan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagaimana diuraikan berikut :

**“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil“**

Tabel T-C.3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Mojokerto
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	B/L	Rencana Tahun 2026 (tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu Indkatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			82 (A)	7.107.655.200			82.17 (A)	11.196.626.875
		Jumlah Inovasi			3 Inovasi				2 Inovasi	
		Nilai IKM			90,8				82	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu			12 Dokumen	12.000.000			12 Dokumen	107.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	6.000.000	APBD		4 Dokumen	53.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	6.000.000	APBD		8 Laporan	53.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dilaporkan			13 Laporan	5.453.708.000			13 Laporan	7.639.858.600
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			420 Orang/bulan	5.453.708.000	APBD		504 Orang/bulan	5.505.148.600
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			100%	732.147.200			100%	2.134.710.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Paket	502.324.630	APBD		1 Paket	1.004.350.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	16.000.000	APBD		12 Paket	26.750.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	45.000.000	APBD		1 Paket	80.250.000
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			1 Paket	38.822.570	APBD		1 Paket	107.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	130.000.000	APBD		12 Laporan	209.043.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			100%	776.800.000			100%	707.317.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	B/L	Rencana Tahun 2026 (tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu Indkatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	266.800.000	APBD		12 Laporan	133.750.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			36 Laporan	510.000.000	APBD		36 Laporan	573.567.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia			100%	133.000.000			100%	385.200.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			16 Unit	40.500.000	APBD		16 Unit	107.000.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	47.500.000	APBD		1 Unit	224.700.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12 Unit	45.000.000	APBD		12 Unit	53.500.000
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk			99,77%	167.645.000			100,00%	1.563.649.850
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP)			880000 Dokumen	167.000.000			863500 Dokumen	861.729.850
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (KK,KTP,KIA)			137000 Dokumen	92.000.000	APBD		136000 Dokumen	487.229.850
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			12 Laporan	75.000.000	APBD		12 Laporan	267.500.000
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen KIA			220000 Dokumen	645.000			145000 Dokumen	107.000.000
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia			100 Dokumen	645.000	APBD		8632 Dokumen	107.000.000
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Lahir & Akta Mati)			99,50%	71.000.000			98,55%	432.280.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	B/L	Rencana Tahun 2026 (tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu Indkatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil(Akta Lahir 0-18 & Akta Mati)			310000 Dokumen	71.000.000			310000 Dokumen	432.280.000
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Akta Lahir & Mati)			65000 Dokumen	71.000.000	APBD		34000 Dokumen	432.280.000
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid			100%	131.000.000			100%	428.000.000
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu			12 kegiatan	81.000.000			12 kegiatan	374.500.000
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan			12 Dokumen	81.000.000	APBD		12 Dokumen	267.500.000
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi			1 kali	50.000.000			1 kali	107.000.000
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			35 Dokumen	50.000.000	APBD		6 Dokumen	107.000.000
TOTAL						7.477.300.200				12.092.573.542

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

No	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN APBD 2026	USULAN APBD 2027
1	2			3	4	5
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.17 (A)	7.107.655.200	8.192.899.300
			Jumlah Inovasi	2 Inovasi		
			Nilai RB	76		
			Nilai IKM	82		
1	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	12 Dokumen	12.000.000	16.500.000
		2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6.000.000	8.250.000
		2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	6.000.000	8.250.000
2	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dilaporkan	13 Laporan	5.453.708.000	6.458.719.300
		2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan	5.453.708.000	6.458.719.300
3	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	732.147.200	1.161.680.000
		2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	502.324.630	829.180.000
		2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	16.000.000	35.000.000

No	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN APBD 2026	USULAN APBD 2027
1	2			3	4	5
		2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	45.000.000	65.000.000
		2.12.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	1 Paket	38.822.570	82.500.000
		2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	130.000.000	150.000.000
4	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	776.800.000	336.000.000
		2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	266.800.000	270.000.000
		2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 Laporan	510.000.000	66.000.000
5	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia	100%	133.000.000	220.000.000
		2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16 Unit	40.500.000	65.000.000
		2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	47.500.000	70.000.000
		2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Unit	45.000.000	85.000.000
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	99,77%	167.645.000	869.549.200

No	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN APBD 2026	USULAN APBD 2027
1	2			3	4	5
1	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP)	880000 Dokumen	167.000.000	789.549.200
		2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	137000 Dokumen	92.000.000	569.549.200
		2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	75.000.000	220.000.000
2	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen KIA	220000 Dokumen	645.000	80.000.000
		2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	100 Dokumen	645.000	80.000.000
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Lahir & Akta Mati)	99,50%	71.000.000	421.300.000
1	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil(Akta Lahir 0-18 & Akta Mati)	310000 Dokumen	71.000.000	421.300.000
		2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	65000 Dokumen	71.000.000	421.300.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid	100%	131.000.000	500.000.000

No	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN APBD 2026	USULAN APBD 2027
1	2			3	4	5
1	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu	12 kegiatan	81.000.000	350.000.000
		2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	12 Dokumen	81.000.000	350.000.000
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	1 kali	50.000.000	150.000.000
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	35 Dokumen	50.000.000	150.000.000
TOTAL PAGU					7.477.300.200	9.983.748.500

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2027 yang akan datang.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian. Pertama, kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran mutlak diperlukan agar kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana. Kedua, apabila terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan anggaran dengan ketersediaan dana, maka perlu dilakukan skala prioritas terhadap program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Ketiga, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sangat penting untuk memastikan capaian sasaran pembangunan administrasi kependudukan yang optimal dan berkelanjutan.

Pelaksanaan program dan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), termasuk transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipatif, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tahapan pelaksanaan harus didasarkan pada indikator kinerja yang terukur, serta memperhatikan standar pelayanan minimal (SPM), prinsip kesetaraan gender, dan pendekatan berbasis teknologi informasi. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga menjadi bagian integral untuk menjamin mutu layanan dan pencapaian hasil yang diharapkan.

Sebagai tindak lanjut dari dokumen ini, langkah strategis yang akan dilakukan meliputi:

- Penyusunan rencana kerja teknis tiap bidang/sub bagian;
- Penyesuaian rencana kegiatan dengan pagu anggaran definitif sesuai hasil Musrenbang dan RKPD;

- Penguatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan program;
- Pengembangan inovasi pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi;
- Penyusunan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.

Dengan dokumen ini, diharapkan seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dapat bekerja secara sinergis, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang membahagiakan masyarakat.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO**



AMAT SUSILO, S.Sos, M.M.

Pembina Tingkat 1

NIP. 19721206 199402 1 001